Menelaah Kurikulum Merdeka sebagai Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sebuah Kajian Literatur

Diah Anisa Lestari¹, Lailatul Qodriyah², Windi Nurohmatul Azizah³,
Muhammad Hufron⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Agama Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

Email: diah.anisa.lestari@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK: Educational policy reforms in Indonesia reflect the nation's response to evolving challenges, particularly the disruption of learning during the COVID-19 pandemic. The Independent Curriculum emerged as a transformative approach emphasizing flexibility, self-directed learning, and character development through the Pancasila Student Profile. This article aims to examine the direction and implementation of the Independent Curriculum through a literature review of relevant academic sources, including journal articles and scholarly books. The findings indicate that the curriculum provides autonomy for teachers and students to design learning processes that align with local contexts and individual needs. It promotes project-based learning and contextual assessments. However, its implementation faces obstacles such as resource disparities and limited teacher preparedness.

Keywords: independent curriculum, educational transformation, education policy

ABSTRACT: Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia mencerminkan respons terhadap tantangan zaman, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses belajar mengajar. Kurikulum Merdeka hadir sebagai alternatif transformasi pendidikan yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Artikel ini bertujuan mengkaji arah dan implementasi Kurikulum Merdeka melalui studi literatur terhadap referensi ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal dan buku akademik. Temuan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru dan peserta didik dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan lokal dan individual. Kurikulum ini juga menekankan pembelajaran berbasis proyek serta penilaian yang lebih kontekstual. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti kesenjangan sumber daya dan kesiapan tenaga pendidik.

Keywords: kurikulum merdeka, transformasi pendidikan, kebijakan pendidikan.

Copyright © 2025 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama dalam pembentukan peradaban suatu bangsa (L, 2022; Maskalan et al., 2020). Lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan, pendidikan merupakan sistem yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek intelektual, spiritual, serta sosial yang saling terintegrasi (Enakrire, 2021). Dalam konteks globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini, sistem pendidikan dituntut untuk lebih adaptif dan visioner, agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik (Herjanu, 2020), tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta daya saing yang tinggi (Lee, 2021). Perubahan sosial, dinamika ekonomi, dan perkembangan teknologi digital menjadi faktor eksternal yang tak terhindarkan dan menuntut sistem pendidikan untuk terus berevolusi.

Di tengah kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, kurikulum menjadi aspek kunci yang menentukan arah dan kualitas pendidikan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahid, (2014) dan Egan, (1978), kurikulum merupakan seperangkat program yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan tujuan pendidikan, dan harus mampu merespons kebutuhan peserta didik serta tantangan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah proses strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Somad (Somad, 2021), pendidikan yang ideal harus mampu menyesuaikan diri dengan kapasitas dan potensi siswa, yang berarti kurikulum pun harus inklusif, kontekstual, dan progresif.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai kali perubahan kurikulum, sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, setiap pembaruan membawa semangat untuk menyelaraskan pendidikan dengan arah pembangunan nasional dan karakter bangsa. (Amanulloh & Wasila, 2024) mencatat bahwa hingga saat ini, Indonesia telah mengganti kurikulumnya sebelas kali. Namun, perubahan tersebut tidak boleh mengaburkan esensi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila—yakni menciptakan generasi yang cerdas, bermoral, dan religius (Ritonga, 2018). Dengan demikian, perubahan kurikulum harus senantiasa mempertahankan ruh ideologis bangsa, sembari tetap terbuka terhadap inovasi dan kebutuhan global.

Salah satu bentuk transformasi kurikulum terbaru adalah lahirnya Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Kurikulum ini dikembangkan sebagai respons atas dampak besar pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran, sekaligus sebagai penyempurnaan terhadap Kurikulum 2013 (Hartoyo et al., 2023a). Dengan membawa semangat “Merdeka Belajar,” Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pembelajaran, memberi ruang kepada guru untuk berinovasi, dan mendorong peserta didik

agar lebih aktif dalam proses belajar yang kontekstual dan bermakna (Dewi Rahmadayani, 2022).

Kurikulum Merdeka dirancang untuk lebih berorientasi pada karakter dan kompetensi siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun secara teoritis pendekatan ini tampak menjanjikan, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Persoalan kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, dan disparitas antarwilayah menjadi hambatan struktural yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Ketidaksiapan sebagian satuan pendidikan dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesenjangan mutu pendidikan antar daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis Kurikulum Merdeka sebagai arah baru pendidikan Indonesia. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur terhadap sejumlah sumber relevan, dengan fokus pada pemetaan isu-isu konseptual, peluang, serta tantangan yang muncul dalam proses implementasi kurikulum ini. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik sekaligus menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan Indonesia. Subjek dalam penelitian ini berupa dokumen ilmiah seperti artikel jurnal, buku akademik, dan laporan kebijakan yang membahas Kurikulum Merdeka dan transformasi kurikulum di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Penelusuran data dilakukan melalui dua basis data utama yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, yaitu Google Scholar dan Mendeley (Hak et al., 2022; Ihsan et al., 2024; Saidin et al., 2023). Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kontribusinya dalam memperkaya pemahaman terhadap arah baru kebijakan kurikulum nasional. Langkah ini dilakukan guna memperoleh data yang valid dan kontekstual terhadap permasalahan yang diangkat.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen yang dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti menyusun panduan analisis isi sebagai instrumen bantu dalam mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti latar belakang Kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran, pendekatan pedagogis, serta tantangan dalam implementasi di lapangan (Creswell, 2018). Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna dari setiap temuan yang ada dalam literatur.

Seluruh proses penelitian berlangsung secara daring dari bulan Juni hingga Agustus, dengan lokasi pelaksanaan yang tidak terbatas secara geografis karena seluruh proses dilakukan secara digital. Dengan langkah metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami posisi Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan strategis dalam transformasi pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kurikulum Merdeka

Pada awal kemunculannya, Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai alternatif dari Kurikulum Darurat yang sebelumnya menggantikan Kurikulum 2013 selama masa pandemi. Pemerintah tidak langsung mewajibkan semua satuan pendidikan untuk mengadopsi Kurikulum Merdeka, melainkan memberikan kebebasan bagi sekolah-sekolah untuk memilih salah satu dari tiga kurikulum yang tersedia: Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka (Mulyasa, 2023). Fleksibilitas ini dimaksudkan agar penerapan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta kesiapan peserta didik dan pendidik di masing-masing wilayah.

Sebelum Kurikulum Merdeka resmi diberlakukan secara nasional, Kurikulum 2013 telah lebih dulu digunakan sebagai pengganti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2019 menyebabkan terganggunya aktivitas pembelajaran secara menyeluruh. Menanggapi kondisi ini, pemerintah meluncurkan Kurikulum Darurat pada tahun 2020 sebagai respons cepat untuk mendukung kelangsungan pembelajaran dari rumah. Setelah melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan pascapandemi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum *Prototipe* (Hartoyo et al., 2023b).

Kurikulum Merdeka akhirnya resmi diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 11 Februari 2022 secara daring. Peluncuran ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (2022). Kurikulum ini dirancang untuk membentuk profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, bergotong royong, serta menjunjung tinggi kebhinekaan global. Dalam konteks pemulihan pembelajaran pascapandemi, Kurikulum Merdeka menjadi pilihan yang ditawarkan kepada sekolah-sekolah yang siap melaksanakannya hingga tahun 2024. Melalui pendekatan “Merdeka Belajar,” kurikulum ini menekankan pada kebebasan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing.

2. Paradigma Baru Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka sebagai upaya transformasi Pendidikan di Indonesia, memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa (Rahma & Hindun, 2023). Dengan adanya konsep fleksibilitas inilah yang membedakan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Berikut beberapa paradigma baru Kurikulum Merdeka dilihat dari berbagai aspek (Pratycia et al., 2023) :

Tabel 1. Paradigma baru Kurikulum Merdeka dilihat dari berbagai aspek

Aspek	Cakupan
Kerangka Dasar	Landasan utama Kurikulum Merdeka adalah tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, serta pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik (P5)
Kompetensi yang Dituju	Capaian pembelajaran disusun dalam bentuk fase untuk merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi
Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum dibagi dalam 2 kegiatan pembelajaran yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila Adapun pembagian jam pelajaran diserahkan kepada satuan pendidikan terkait dan bersifat fleksibel Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi
Pembelajaran	Mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda Adapun pembelajaran intrakurikuler sekitar 70- 80% dari jam pelajaran, sedangkan pembelajaran kokurikuler seperti P5 sekitar 20- 30% dari jam pelajaran
Penilaian	Penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik Penguatan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik dilaksanakan secara bersama-sama (tidak dipisah)

Perangkat Kurikulum	Panduan Pembelajaran dan Asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling
---------------------	--

Kurikulum Merdeka dirancang oleh Kemendikbudristek sebagai respons strategis dalam mendukung pemulihan pembelajaran pascapandemi, dengan mengusung sejumlah karakteristik yang menekankan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik. Salah satu ciri utamanya adalah penerapan pembelajaran berbasis projek (*project-based learning*) yang bertujuan membentuk soft skills serta nilai-nilai luhur seperti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, semangat gotong royong, keberagaman global, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas. Selain itu, kurikulum ini memfokuskan pada materi-materi esensial, seperti literasi dan numerasi, agar siswa dapat mendalami kompetensi dasar secara optimal. Guru pun diberikan fleksibilitas untuk merancang proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta kondisi lokal, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan. Secara struktural, Kurikulum Merdeka mencakup kegiatan intrakurikuler dan projek penguatan profil pelajar Pancasila, sekaligus membuka ruang bagi sekolah untuk mengembangkan program-program tambahan yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*), kurikulum ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, serta menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan potensi individu, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan bermakna.

3. Analisis Kebijakan Merdeka Belajar

Transformasi pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila (Vhalery et al., 2022). Untuk menjawab tantangan global mengenai kualitas pendidikan yang menjadi output proses pembelajaran, maka terdapat enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, bersikap mandiri, bernalar kritis, dan bersikap mandiri.

Kebijakan merdeka belajar sejalan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada kebebasan untuk belajar secara kreatif dan mandiri, sehingga mendorong terciptanya karakter jiwa merdeka. Hal ini sejalan dengan profil pelajar pancasila dikarenakan siswa dan guru secara bebas dapat mengeksplorasi pengetahuan dari sekitarnya.

Pemberlakuan kebijakan merdeka belajar pada Kurikulum Merdeka dilandasi beberapa hal seperti hasil penelitian *Programme for International Student*

Assesment (PISA) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah khususnya menteri pendidikan langsung bertindak dengan merumuskan kebijakan baru untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Dengan diberlakukannya merdeka belajar yang meliputi penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya (Firdaus et al., 2022).

Terdapat empat pokok kebijakan yang diberlakukan pada program merdeka belajar, yaitu sebagai berikut:

a. Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) menjadi Asesmen Kompetensi

Mengganti USBN menjadi Asesmen Kompetensi dimaksudkan untuk mengembalikan keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan sesuai dengan UU Sisdiknas (Istiqomah & Fauziah, 2024). Mengacu pada konsep fleksibilitas, seorang guru dapat membuat desain penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Penilaian kompetensi siswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Bagi siswa, pergantian USBN menjadi asesmen kompetensi sangat membantu mereka mengurangi tekanan psikologis, mengingat pelaksanaan USBN yang dilaksanakan pada kurikulum sebelumnya sangat komplek dengan memuat hampir seluruh materi yang diajarkan, sehingga seringkali siswa merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Bagi seorang guru, penilaian semacam ini memberikan mereka keluwesan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa sesuai dengan situasi siswa maupun sekolah. Sedangkan bagi satuan pendidikan atau sekolah menganggap bahwa asesmen kompetensi bernilai positif dalam mendorong hasil belajar siswa yang lebih baik.

b. Mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Mengganti UN menjadi penilaian kompetensi minimum dan Survei Karakter dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada guru, siswa, dan orang tua. UN dianggap kurang optimal digunakan sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Penggantian UN menjadi Asesmen kompetensi dimaksudkan untuk mengukur kompetensi bernalar seperti literasi dan numerasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah personal maupun profesional yang mengacu pada praktik pada level internasional seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS). Survei karakter

mendukung penguatan profil pelajar pancasila seperti aspek karakter seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong.

c. Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Perampingan RPP dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja guru. Sebelumnya RPP memiliki terlalu banyak komponen apabila ditulis dapat mencapai 20 halaman bahkan lebih. Pada Kurikulum Merdeka RPP cukup dituliskan 1 halaman yang memuat tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Adanya meminimalisir rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini bertujuan untuk menyederhanakan tugas administrasi guru sehingga guru memiliki waktu yang lebih untuk fokus pada pembelajaran yang bersifat variatif (Ilmawan, 2024). Modul ajar pada kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan pada pendidik dalam proses menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik.

d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dibuat lebih fleksibel. Rancangan peraturan sebelumnya membagi PPDB sistem zonasi menjadi tiga yaitu jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15%, jalur perpindahan 5%. Sedangkan rancangan peraturan terbaru menjadi empat yaitu jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, jalur prestasi 0 - 30%.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam upaya pemulihan pascapandemi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis pada karakter dan kompetensi, serta berfokus pada Merdeka Belajar, kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dan penilaian holistik melalui asesmen formatif memperkaya pengalaman belajar siswa, sementara penguatan Profil Pelajar Pancasila berkontribusi pada pengembangan karakter siswa yang lebih mendalam. Meskipun demikian, tantangan dalam kesiapan guru, kesenjangan sumber daya di daerah tertentu, serta konsistensi implementasi di lapangan masih perlu perhatian serius. Ke depan, keberhasilan Kurikulum Merdeka bergantung pada dukungan berkelanjutan terhadap pelatihan guru, infrastruktur pendidikan, serta evaluasi yang konsisten untuk memastikan kurikulum ini dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, N. (2014). Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.12-29>
- Amanulloh, M. J. A., & Wasila, N. F. W. (2024). Implementasi dan Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 33–58. <https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i1-3>
- Creswell, J. W. , & P. C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Egan, K. (1978). What Is Curriculum? *Curriculum Inquiry*, 8(1), 65–72. <https://doi.org/10.1080/03626784.1978.11075558>
- Enakrire, R. T. (2021). *Knowledge Transfer Among Academics in Higher Education Institutions* (pp. 424–441). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6618-3.ch025>
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 686–692.
- Hak, P., Untarti, D. P., Hayari, H., Alwi, A., & Dinda, L. O. (2022). Pelatihan Penelusuran Referensi Berskala Nasional dan Internasional dalam Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP UHO. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 574–581. <https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.940>
- Hartoyo, A., Melati, R., & Martono, M. (2023a). DAMPAK PERUBAHAN KURIKULUM MERDEKA DAN KESIAPAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENYESUAIAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 412–428. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2773>
- Hartoyo, A., Melati, R., & Martono, M. (2023b). DAMPAK PERUBAHAN KURIKULUM MERDEKA DAN KESIAPAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENYESUAIAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 412–428. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2773>
- Hertanu, C.-L. (2020). Future Education within Disruptive Technologies Developments. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 26(2), 288–293. <https://doi.org/10.2478/kbo-2020-0092>
- Ihsan, T., Nina, & Hasanah, N. K. (2024). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa. *Karuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 30–38. <https://doi.org/10.62238/karuna.v1i1.44>
- Ilmawan, D. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 820–828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10546>

- Istiqomah, I., & Fauziah, S. (2024). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Di TK Ananda 1 Kabupaten Semarang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(12), 1329–1338. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i12.2584>
- L, J. S. prema. (2022). The Importance of Education and the Evolution of Teaching in the Modern Era. *Indian Journal of Multilingual Research and Development*, 187–191. <https://doi.org/10.54392/ijmrd223S136>
- Lee, M. H. (2021). Globalization and Disruption: What Policy Lessons Can Be Learnt from High Performing Education Systems of Singapore and Hong Kong? In *Third International Handbook of Globalisation, Education and Policy Research* (pp. 699–715). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66003-1_40
- Maskalan, A., Jurki, A., & Rogošić, S. (2020). What are the key roles of education? *JADR*, 11(2), 445–465. <https://doi.org/10.21860/j.11.2.7>
- Pratycia, A., Putra, A. D., Ghina, A., Salsabila, M., & Adha, F. I. (2023). Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Analisa Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 58–64.
- Rahma, S. N., & Hindun, H. (2023). Efektivitas Kurikulum Merdeka dalam Proses Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Reduplikasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 3(2), 1–14.
- Saidin, Sudirman, F. A., H, L. O. H., Asriani, Yusuf, M., Abdullah, A., & Amin, H. (2023). Pemanfaatan Mendeley dan Google Scholar dalam Sitasi Karya Ilmiah. *Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.52423/kongga.v1i1.4>
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 171–186. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.882>
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>